



Gabungan Politik Indonesia Masa Pergerakan Nasional 1939-1942 (Dinamika, Strategi, dan Pengaruhnya terhadap Perjuangan Kemerdekaan)

Ingriet Mahgrita Olfia Mumekh¹, Aksilas Dasfordate², Darmawan Edi Winoto³

Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: inggritolviamumekh@gmail.com¹, aksilasdastfordate@unima.ac.id²,
darmawanediwonoto@unima.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 24 April 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the political dynamics in the late Dutch colonial period, marked by rising Indonesian nationalism and the stagnation of colonial policies. The Indonesian Political Federation (GAPI) emerged as a response to these conditions. This research aims to explain the dynamics of GAPI from 1939 to 1942 within the context of political changes preceding the Japanese occupation. This study employs a historical approach by systematically examining past developments and applying historical methods, including source collection, external and internal criticism, data categorization, and cause-and-effect analysis. The findings reveal that GAPI played a crucial role in consolidating national political forces through its "Indonesia Berparliament" campaign, which aimed to push for reforms in the colonial political structure. It also strengthened unity among nationalist parties and developed more coordinated political strategies. However, GAPI faced significant challenges, including repressive colonial policies and the impact of World War II. The dissolution of GAPI in 1942 was not solely due to the Japanese occupation but also resulted from the limited political space created by earlier colonial policies. In conclusion, GAPI had a significant role in strengthening national political awareness and served as an important foundation for Indonesia's struggle for independence.

Keywords: National Movement, 1939-1942.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik pada akhir masa kolonial Hindia Belanda yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan nasionalisme dan stagnasi kebijakan kolonial. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) muncul sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika GAPI pada periode 1939-1942 dalam konteks perubahan politik menjelang pendudukan Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan menelaah perkembangan masa lampau secara sistematis, serta menerapkan metode sejarah melalui tahapan pengumpulan sumber, kritik ekstern dan intern, kategorisasi data, dan analisis sebab-akibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GAPI berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan politik nasional melalui kampanye "Indonesia Berparlemen" yang mendorong reformasi politik kolonial. Organisasi ini juga berhasil memperkuat persatuan antarpertai nasionalis dan menciptakan strategi perjuangan yang lebih terkoordinasi. Namun, gerakan GAPI menghadapi berbagai hambatan, termasuk kebijakan represif pemerintah kolonial dan dampak Perang Dunia II. Pembubaran GAPI pada tahun 1942 tidak hanya disebabkan oleh pendudukan Jepang, tetapi juga oleh terbatasnya

ruang politik yang telah lama dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kesimpulannya, GAPI memiliki peran signifikan dalam memperkuat kesadaran politik nasional dan menjadi fondasi penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: Pergerakan Nasional, 1939-1942.

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan sosial dan politik yang membuka jalan bagi munculnya gerakan nasional. Salah satu faktor utama perubahan ini adalah kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat lokal, terutama kelompok penguasa, terhadap pendidikan formal. Pendidikan ini menjadi sarana untuk membentuk kesadaran politik generasi muda Indonesia. Mereka mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi dalam sistem kolonial yang diterapkan oleh Belanda, lalu secara perlahan mengorganisir diri untuk melawan dominasi tersebut. Tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional, seperti Sukarno Hatta, Sutan Shahrir, dan Ki Hajar Dewantara, adalah hasil dari kebijakan pendidikan ini. Ide-ide mereka tidak hanya tercipta dari pengalaman hidup mereka di bawah pemerintahan kolonial, tetapi juga dipengaruhi oleh ideologi yang berkembang di Eropa, seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Orang-orang ini berperan penting dalam memimpin dan mengorganisir perlawanan terhadap Belanda melalui cara diplomasi, pendidikan, serta gerakan bersenjata.

Selain faktor pendidikan, ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga memicu munculnya gerakan nasional. Pada masa kolonial, kehidupan rakyat Indonesia sangat sulit. Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang merugikan penduduk, seperti sistem tanam paksa yang memaksa petani menanam tanaman untuk diekspor ke Belanda. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat terutama di daerah pedesaan, menderita kemiskinan dan kesulitan hidup. Selain itu, masyarakat juga mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan hak politik, yang memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajahan. Dampak positif dari kondisi ini adalah memperkuat persatuan bangsa di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, sehingga memicu munculnya semangat solidaritas dalam melawan pemerintah kolonial melalui kampanye seperti penolakan produk Belanda dan gerakan non-kooperasi. Hal ini meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta memperkenalkan ide-ide modern seperti nasionalisme dan demokrasi, yang akhirnya mempercepat lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. GAPI yang berdiri pada tahun 1939 merupakan wadah kerja sama sejumlah partai politik nasionalis yang bertujuan memperjuangkan pembentukan parlemen bagi Indonesia.

Kehadiran GAPI pada masa akhir pemerintahan kolonial Belanda memang memiliki arti penting dalam dinamika pergerakan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya GAPI tidak hanya memberikan kontribusi positif, tetapi juga memunculkan berbagai dampak negative yang bersumber dari persoalan internal organisasi maupun tekanan eksternal dari pemerintah colonial (Situngkir et al., 2024). Dari sisi internal, permasalahan yang dihadapi GAPI adalah rendahnya

tingkat kesatuan diantara partai-partai anggotanya. Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan latar belakang ideologis dan kepentingann politik masing-masing organisasi. Parindra cenderung mengusung nasionalisme moderat, PSII berlandaskan ideologi islam, sementara gerindro memiliki kecenderungan kiri dan bersikap lebih kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Perbedaan orientasi tersebut menyulitkan GAPI dalam merumuskan sikap politik yang tegas dan berkesinambungan. Pengembalian Keputusan yang banyak didasarkan pada kompromi antar anggota pada akhirnya melemahkan efektivitas perjuangan politik GAPI, persatuan yang terbangun pun lebih bersifat praktis dan situasional, belum menerminkan kesatuan ideologis yang solid.

Pemberlakuan undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870 membuka jalan bagi masuknya modal swasta dan berkembangnya sistem kapitalisme di Hindia-Belanda. Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan ini justru semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat pribumi. Seiring berjalannya wakt, terutama pada awal abad ke-20 mulai tumbuh kesadaran kolektif dikalangan masyarakat pribumi mengenai persamaan nasib akibat penjajahan. Kesadaran tersebut banyak dipelopori oleh kaum muda, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri (Yusuf & Pratama, 2022).

Kesadaran Nasional ini kemudian mendorong munculnya berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan melalui jalur politik, sosial, ekomoni, dan budaya. Dari rangkaian perjuangan tersebut lahirlah pergerakan nasional Indonesia sebagai Upaya terorganisasi untuk mencapai kemerdekaan. Perkembangan nasionalisme selanjutnya melahirkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, nasionalisme indonesia bersifat integralistik, yaitu menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang setara tanpa membedakan latar belakang golongan atau kelompok tertentu mengatasnamakan segala keanekaragaman (Tarigan et al., 2025). Nasionalisme sudah terbentuk di Nusantara sejak zaman Kerajaan Majapahit berkuasa. dalam Sejarah Nusantara, salah satu contoh awal semangat persatuan di Nusantara dapat dilihat dari sosok Mahapatih Gajah Mada. Melalui ikrarnya yang dikenal sebagai sumpah palapa, Gajah Mada menegaskan tekad untuk menyatukan wilayah Majapatih dengan seluruh Nusantara. Sumpah tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya persatuan sebagai syarat utama dalam dalam mewujudkan cita-cita bersama. Nilai persatuan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran nasional dikalangan Masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya Sejarah (Lubis et al., 2022), kesadaran nasional tersebut melahirkan berbagai bentuk pergerakan nasional Indonesia. Hal itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Serekat Islam, Indische Partij, serta organisasi lainnya. Pergerakan nasional tidak dapat dilepaskan dari semangat nasionalisme, karena keberadaan Gerakan tersebut pada dasarnya didorong oleh rasa cinta tanah air dan keinginan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme dan pergerakan nasional merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi landasan awal dalam mengkaji Sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu penelaahan sistematis terhadap peristiwa masa lampau (Haryanto, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam dinamika Gabungan Politik Indonesia pada masa Pergerakan Nasional antara tahun 1939–1942, dengan menempatkannya dalam konteks perkembangan sosial dan politik pada masa tersebut. Dalam penelitian historis ini, sampel tidak dimaknai sebagai responden, melainkan berupa sumber-sumber sejarah yang relevan, seperti dokumen, arsip, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan Gabungan Politik Indonesia pada periode tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Marc Bloch yang meliputi empat tahapan. Pertama, merumuskan masalah dan melakukan observasi historis melalui pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, melakukan kritik sejarah atau pengujian data secara ekstern dan intern untuk memastikan keabsahan sumber. Ketiga, melakukan generalisasi dan kategorisasi data sesuai dengan permasalahan penelitian. Keempat, melakukan analisis sebab-akibat terhadap peristiwa yang diteliti, khususnya terkait lingkungan sejarah Gabungan Politik Indonesia pada periode 1939–1942. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu metode yang menekankan pada pemanfaatan bahan pustaka sebagai sumber utama data, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Sampel sumber yang digunakan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan topik penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat representatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkritisi data secara internal dan eksternal guna memastikan kredibilitas dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Berparlemen Dan kaitannya Dengan Komisi Visman

Indonesia menerapkan sistem parlementer yang mengintegrasikan elemen pemerintahan presidensial dengan komponen parlementer yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden, yang juga berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam pengawasan pembuatan undang-undang dan bahkan memiliki kemampuan untuk memastikan pilihan presiden yang sesuai (Taufik, 2021). Anggota DPR ditentukan melalui pemilihan umum, serta dewan perwakilan daerah yang memperwakilan wilayah tertentu. Sistem ini berasal dari masa kolonial Belanda, di mana elemen parlementer pernah diperkenalkan melalui Volksraad pada tahun 1918. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 melanjutkan kerangka ini, dengan perubahan dan amandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang memperkuat fungsi DPR dan sistem checks and balances.

Komisi Visman merupakan komisi parlementer yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada masa sistem Bretton Woods, yang berlangsung

sebelum tahun 1945. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound sterling (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa diikatkan kepada emas. Komisi ini dipimpin oleh Mr. Visman, yang saat itu menjabat sebagai hakim tinggi. Ia berhasil mengungkap korupsi yang meluas (Claudia et al., 2024), termasuk praktik yang melibatkan pejabat kolonial, seperti Gubernur Jendral Dirk Fock. Kasus ini dikenal sebagai Skandal Visman, yang merupakan salah satu skandal korupsi paling besar dalam masa kolonial dan mengguncang pemerintahan Belanda di Indonesia.

Komisi Visman merupakan contoh awal pembentukan komisi parlementer di Indonesia yang pada masa itu disebut Hindia-Belanda. Volksraad, parlemen kolonial, mendirikan komisi ini dengan tujuan mengawasi jalannya eksekutif. Hal ini menunjukkan awal mula parlementarisme di tanah air, di mana lembaga legislatif memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap pemerintah. Skandal ini menjadi dorongan bagi penguatan prinsip akuntabilitas dan pengawasan melalui mekanisme parlementer, yang terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Tampubolon, 2017). Komisi Visman dianggap sebagai preseden sejarah bagi pelaksanaan mekanisme ini meskipun dalam konteks kolonial. Gerakan Nasional tidak hanya mempercepat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tetapi juga menanamkan dasar bagi perkembangan politik Indonesia di masa depan.

Politik Indonesia pada masa pergerakan nasional memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kerja sama dalam perjuangan mencapai tujuan bersama. Meskipun berbeda strategi dan ideologi, para pemimpin pergerakan nasional tetap berpegang pada prinsip membebaskan Indonesia dari belenggu kolonial. Dalam konteks politik modern, semangat persatuan ini tetap relevan dan menjadi landasan menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, kajian politik Indonesia sangat penting, karena tidak hanya memberikan pemahaman tentang dinamika politik pergerakan nasional, tetapi juga memberikan pembelajaran berharga bagi perkembangan politik masa kini.

Dampak Adanya Pergerakan Nasional

Tujuan utama dari pergerakan nasional adalah mewujudkan kemerdekaan, dalam Upaya mencapai tujuan tersebut Masyarakat didorong untuk menumbuhkan sikap persatuan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Sampai pada akhirnya semangat persatuan inilah yang kemudian melahirkan berbagai peristiwa yang cukup penting dalam Sejarah pergerakan nasional (Abdullah, 2018), salah satu tonggak awalnya ditandai dengan berdirinya kesadaran nasional dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan pergerakan nasional selanjutnya tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, pada peristiwa tersebut para pemuda menyatakan komitmen untuk Bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu Bahasa. Rangkaian perjuangan yang berlangsung dalam kurun waktu yang Panjang tersebut, pada akhirnya menghantarkan Indonesia pada peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pergerakan nasional yang berkembang secara bertahap membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik pada masa penjajahan maupun

setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, dinamika pergerakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor yang mendorong tumbuhnya kesadaran nasional. Selain itu, pergerakan nasional juga menimbulkan beragam dampak yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia hingga masa sekarang, diantaranya:

Dalam dimensi sosial, pergerakan nasional memiliki peran strategis dalam menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat kerukunan, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa. Melalui proses pergerakan ini, masyarakat mulai belajar mengembangkan kehidupan bersama ditengah keberagaman latar belakang kedaerahan, budaya, dan kebiasaan, dengan menekankan nilai saling menghargai dan toleransi. Kesadaran tersebut tercermin dari lahirnya berbagai organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan organisasi sejenis lainnya yang berfungsi sebagai wadah pembinaan identitas sekaligus sarana memperkuat rasa persatuan dikalangan generasi muda. Disamping organisasi kepemudaan, pergerakan nasional juga ditopang oleh berkembangnya organisasi sosial dan keagamaan yang memberikan kontribusi penting terhadap dinamika perjuangan bangsa, orgsnisasi-organisasi seperti taman siswa yang berdiri pada tahun 1922, Muhammadiyah pada tahun 1912, dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 tidak hanya berperan dalam bidang Pendidikan serta pembinaan sosial keagamaan, tetapi juga memiliki andil yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam ranah ekonomi, praktik kolonialisme menimbulkan penderitaan yang meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada umumnya lebih berpihak pada kepentingan kolonial serta kelompok tertentu, sehingga menempatkan masyarakat pribumi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keadaan ini memicu terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang semakin dirasakan terutama oleh kelompok terpelejar baik yang memperoleh Pendidikan didalam negeri maupun luar negeri (Purba et al., 2024). Pengalaman menghadapi diskriminasi dan eksploitasi ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus mendorong tumbuhnya kesadaran kritis ditengah masyarakat, kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai respon dan bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang dianggap merugikan. Reaksi inilah yang selanjutnya berperan sebagai salah satu faktor penting yang mendorong berkembangnya pergerakan nasional di Indonesia.

Dalam bidang politik, praktik kolonialisme berperan dalam mendorong munculnya kesadaran kebangsaan dikalangan masyarakat Indonesia. Penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, secara tidak langsung melahirkan kelompok terdidik. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi bagian masyarakat yang memiliki daya piker kritis serta kesadaran bahwa sistem penjajahan merupakan bentuk dominasi dan penindasan yang patut dipersoalkan. Tumbuhnya kesadaran tersebut membawa perubahan signifikan dalam bentuk strategi perlawanan terhadap kolonial, perjuangan tidak lagi hanya diwujudkan melalui perlawanan fisik, tetapi mulai diarahkan pada cara-cara yang lebih terorganisasi dan rasional, seperti kegiatan diskusi, penyebaran ide dan pemikiran,

serta pendirian organisasi. Sejak awal abad ke-20, bermunculan berbagai organisasi pergerakan dengan latar belakang kedaerahan, nasional, maupun kelompok tertentu. Keberadaan organisasi-organisasi ini menjadi sarana bagi berbagai lapisan masyarakat di Hindia Belanda untuk menghimpun kekuatan dan menyampaikan aspirasi perlawanan terhadap penjajahan secara lebih terstruktur dan sistematis (Yuniyati et al., 2018).

Pergerakan nasional di Indonesia yang mulai tumbuh sejak awal abad ke-20 membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, maupun budaya. Salah satu dampak terpenting adalah meningkatnya kesadaran nasional akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Sebelum adanya organisasi modern seperti Budi Utomo (1908), perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah (Muhtarom & Marta, 2024). Namun, setelah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan, masyarakat mulai memahami bahwa penjajahan tidak bisa dilawan secara terpisah, melainkan harus dilakukan dengan semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat.

Dalam bidang politik, pergerakan nasional membuka jalan bagi lahirnya organisasi politik modern. Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan berbagai organisasi lainnya memperkenalkan gagasan demokrasi, perlawanan non-kooperatif maupun kooperatif terhadap Belanda, serta tuntutan kemerdekaan. Hal ini mengubah pola perjuangan rakyat Indonesia dari sekadar perlawanan fisik menjadi perjuangan dengan strategi politik, pendidikan, dan diplomasi (Rasyid et al., 2020).

Dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat besar. Munculnya organisasi pergerakan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa berperan dalam mencerdaskan rakyat dan menanamkan nilai kebangsaan melalui Pendidikan (Anisa, 2023). Kesadaran sosial ini memperkuat ikatan antarindividu dari berbagai daerah, agama, dan etnis yang sebelumnya lebih terikat pada kepentingan local.

Selain itu, pergerakan nasional berdampak pada bidang budaya, terutama dalam memperkuat identitas nasional. Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi tonggak penting, di mana bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Hal ini membuktikan bahwa pergerakan nasional tidak hanya berfokus pada politik, tetapi juga pada pembentukan jati diri bangsa melalui bahasa, simbol, dan semangat kebangsaan yang menyatukan (Tahir et al., 2025).

Akhirnya, dampak paling nyata dari pergerakan nasional adalah terbukanya jalan menuju Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semua pengalaman, jaringan, dan kesadaran yang dibangun melalui organisasi pergerakan menjadi fondasi kuat bagi para pemimpin bangsa untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Gerakan Kemerdekaan Utama Selama 1939-1942

Selama periode 1939-1942, gerakan kemerdekaan Indonesia dikelola oleh berbagai organisasi dan tokoh kunci yang terus beroperasi meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Partai Nasional Indonesia (PNI), yang

didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927, memainkan peran penting dalam mendorong nasionalisme dengan menekankan kegiatan bawah tanah, seperti diskusi dan pendidikan politik, meskipun Soekarno sendiri telah diasingkan sejak tahun 1930-an dan terus menyebarkan ide-ide nasionalis melalui tulisannya. Pendidikan nasionalis juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir, yang diasingkan ke Boven Digoel dan Banda, di mana mereka menyoroti pentingnya persatuan nasional dan sosialisme sebagai dasar kemerdekaan melalui dialog dan publikasi. Sarekat Islam (SI), sebagai kelompok berbasis Islam, terus beroperasi meskipun mengalami kemunduran, dengan fokus utama pada isu-isu sosial-ekonomi seperti hak-hak pekerja dan petani, yang merupakan komponen penting dari gerakan secara keseluruhan. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang hancur akibat pemberontakan 1926-1927, mulai pulih secara diam-diam dengan memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap kolonialisme untuk menyebarkan ide-ide revolusioner

Peristiwa penting pada periode ini dimulai pada 1939, ketika Perang Dunia II meletus di Eropa dan Belanda merasa terancam oleh Jerman, mendorong mereka untuk memperkuat pasukan militer di Hindia Belanda untuk menghadapi kemungkinan invasi Jepang. Gerakan nasionalis tidak dapat beroperasi secara terbuka, dengan Soekarno dan Hatta tetap berada di pengasingan sambil menghasilkan buku dan artikel yang menumbuhkan semangat kemerdekaan, disertai dengan peningkatan aktivitas pemuda melalui kelompok seperti Gerakan Pemuda Indonesia. Pada tahun 1940, setelah Belanda jatuh ke tangan Nazi Jerman pada bulan Mei, posisi kolonial mereka di Indonesia melemah, memberikan harapan baru bagi nasionalis yang mulai membangun hubungan dengan kekuatan luar seperti Jepang—yang dianggap sebagai pembebas dari kolonialisme Barat—meskipun gerakan tersebut masih terbatas karena Belanda tetap memegang kendali administratif.

Tahun 1941 menyaksikan Jepang menjadi semakin agresif di Asia-Pasifik setelah serangan terhadap Pearl Harbor pada Desember, di mana gerakan nasionalis di Indonesia mulai bersiap dengan meningkatkan propaganda melalui koran dan radio untuk menyuarakan penolakan terhadap kolonialisme, sementara Belanda berusaha mendapatkan dukungan populer melalui program “New Indies”, yang menawarkan reformasi tetapi dianggap sebagai tipu daya. Akhirnya, pada 1942, invasi Jepang ke Hindia Belanda pada Februari-Maret termasuk serangan terhadap Tarakan dan Balikpapan menjadi titik balik, dengan Belanda menyerah pada 8 Maret, membuka peluang besar bagi gerakan kemerdekaan karena Jepang berjanji untuk membebaskan Asia dari pengaruh Barat, mendorong tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta untuk mulai bernegosiasi mencari dukungan, meskipun mereka menyadari agenda imperialis Jepang.

Pengaruh Gabungan Politik Indonesia 1939-1942

Gabungan Politik Indonesia (GAPI), yang didirikan pada tahun 1939, memiliki peranan signifikan dalam mendorong kemajuan gerakan nasional Indonesia seiring dengan perjuangan menuju kemerdekaan. Sebagai platform yang menyatukan beragam partai dan kelompok politik, seperti Parindra, Gerindo, PSII,

dan Partai Tionghoa Indonesia, GAPI mampu mengonsolidasikan kekuatan politik rakyat Indonesia yang sebelumnya terpisah akibat perbedaan ideologi. Dengan semboyan "Indonesia Berparlemen Sekarang", GAPI meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Inisiatif ini mendorong terciptanya solidaritas nasional serta memperbanyak dukungan untuk konsep pemerintahan mandiri bagi Indonesia. GAPI juga memiliki peranan penting dalam menjalin komunikasi politik yang lebih baik antara organisasi nasionalis dengan masyarakat. Acara seperti Kongres Rakyat Indonesia yang diadakan pada tahun 1941 dan pembentukan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) menjadi bukti tekad bangsa untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang demokratis. Meskipun permintaan mereka untuk membentuk parlemen Indonesia ditolak oleh Belanda, usaha GAPI membantu meneguhkan posisi bangsa Indonesia di panggung politik kolonial dan menanamkan semangat persatuan yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan yang akan datang.

Secara tidak langsung, keberadaan GAPI juga mempersiapkan para pemimpin politik yang kelak akan berkontribusi besar saat pendudukan Jepang dan setelah pengumuman kemerdekaan. Upaya GAPI menunjukkan bahwa strategi politik yang bersifat kooperatif dapat menjadi alat yang berarti dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa. Dengan demikian, GAPI bukan hanya mewakili persatuan politik nasional menjelang 1942, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selain memperkuat semangat persatuan politik, GAPI juga memiliki dampak signifikan dalam membangun kesadaran nasional yang lebih rasional dan terencana. GAPI mengalihkan cara berpikir perjuangan dari sekadar perlawanan emosional ke dalam aksi politik yang lebih teratur dan berbasis program. Melalui pendekatan yang menggunakan diplomasi dan hukum, GAPI menunjukkan kepada rakyat bahwa kemerdekaan bisa diperjuangkan tidak hanya dengan cara bersenjata, tetapi juga dengan strategi politik yang matang. Usaha ini memberikan pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia untuk memahami pentingnya jalur konstitusional dan diplomasi dalam mencapai kemerdekaan. Lebih jauh lagi, GAPI berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dengan membangkitkan kesadaran publik melalui pertemuan umum, pidato, dan publikasi yang mengedepankan nilai-nilai nasionalisme. Gerakan ini berhasil meraih dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk para intelektual serta kelompok etnis non-pribumi seperti Tionghoa Indonesia yang turut menyuarakan aspirasi kemerdekaan. Keterlibatan lintas etnis ini menegaskan bahwa perjuangan GAPI bersifat inklusif dan mencerminkan semangat kebangsaan yang menyatukan semua elemen masyarakat.

Selanjutnya, pengaruh GAPI juga tercermin dalam perubahan sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun Belanda menolak permintaan untuk "Indonesia Berparlemen", tekanan politik dari GAPI membuat mereka mulai menyadari bahwa rakyat Indonesia memiliki kesadaran politik yang kuat dan terorganisir. Ini menjadi faktor penting dalam perubahan dinamika kekuasaan menjelang kedatangan Jepang pada tahun 1942. Jadi, GAPI

tidak hanya berfungsi sebagai sarana perjuangan politik, tetapi juga sebagai tonggak kebangkitan nasional yang menandai kematangan politik bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan.

Upaya untuk membentuk suatu kelompok dengan tujuan Bersama seperti memperjuangkan kemerdekaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta menjaga persatuan, mensyaratkan adanya kesediaan setiap anggota untuk mengesampingkan kepentingan pribadi. Sikap egois dan kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan golongan berpotensi menghambat terwujudnya solidaritas kolektif. Oleh karena itu keberhasilan sebuah Gerakan sangat ditentukan oleh kemampuan para anggotanya dalam membangun kerja sama yang dilandasi sikap saling menghargai dan komitmen terhadap tujuan Bersama. Lahirnya Gerakan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari munculnya golongan terpelajar sebagai hasil dari perkembangan Pendidikan pada masa kolonial. Kelompok terdidik ini mulai memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi sosial dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia, sehingga mendorong lahirnya keinginan untuk memperjuangkan perubahan. Gerakan nasional pada hakikatnya bertumpu pada kesamaan visi, semangat kolektif, serta kemauan untuk bekerja sama dalam kerangka perjuangan yang terorganisasi.

Perkembangan organisasi modern di Indonesia mulai tampak secara nyata pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo. Organisasi ini dipandang sebagai pelopor kebangkitan nasional karena membuka ruang bagi terbentuknya berbagai organisasi pergerakan berikutnya. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut tidak hanya menunjukkan meningkatnya kesadaran berorganisasi dikalangan Masyarakat, khususnya kaum terpelajar dan mahasiswa, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya nilai toleransi, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dinamika internal organisasi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat Gerakan nasional pada masa itu (Palealu et al., 2021).

Peran Gerakan Pemuda dan Tantangan Internal dalam Pergerakan Kemerdekaan 1939-1942

Disamping itu organisasi politik utama seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Serekat Dagang Islam (SDI), dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Gerakan pemuda memiliki peran penting dalam memperkuat semangat kemerdekaan Indonesia antara tahun 1939 sampai 1942, sering kali berfungsi sebagai penggerak utama yang mendukung Upaya diplomasi dari kelompok politik yang ada. Organisasi seperti Gerakan pemuda Indonesia (GPI) dan Jong Java yang didorong oleh semangat nasionalisme dikalangan pemuda, menyelenggarakan kegiatan rahasia seperti diskusi (Putra, 2023), latihan fisik, dan penyebaran propaganda yang menentang kolonialisme lewat penerbitan majalah dan pertemuan kecil. figur pemuda seperti Amir Syarifuddin dan Adam Malik mulai muncul, mendorong kaum muda untuk Bersiap menghadapi perubahan geopolitik, termasuk potensi serangan dari Jepang. Gerakan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan generasi baru tetapi juga menjalin hubungan antara elit politik dengan Masyarakat luas, dengan penekanan pada Pendidikan dan persiapan

militer yang formal, yang kemudian berkontribusi pada proklamasi kemerdekaan 1945.

Namun, tantangan internal dalam kelompok politik seperti GAPI seringkali menghalangi perkembangan, terutama karena perbedaan ideologis dan persaingan antar partai. Contohnya, ketegangan antara nasionalis sekuler seperti Sukarno dan kelompok Islam seperti PSII di dalam GAPI yang mengakibatkan perpecahan, dimana beberapa anggota lebih fokus pada isu-isu keagamaan dari pada nasional. Selain itu, Tindakan repesif oleh Belanda termasuk pengawasan ketat dan peangkapan memaksa banyak aktivis untuk bekerja secara terpisah, yang mengurangi efektivitas kerjasama. Meskipun demikian, tantangan ini justru mendorong lahirnya inovasi, seperti pemanfaatan jaringan bawah tanah dan aliansi praktis dengan kekuatan asing, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan Gerakan. Secara keseluruhan, peran pemuda dan tantangan internal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan bukanlah suatu proses yang sederhana, melainkan dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ideologis, dan eksternal, yang membentuk dasar untuk transisi menuju masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan sepenuhnya.

Antara tahun 1939-1942, situasi ekonomi dan sosial di Hindia-Belanda sangat berperan dalam mempengaruhi Gerakan kemerdekaan, terutama melalui organisasi politik seperti GAPI yang menggunakan ketidakpuasan rakyat untuk meningkatkan rasa solidaritas. Krisis ekonomi global yang dipicu oleh depresi besar yang berkepanjangan, ditambah ancaman dari perang dunia II, menyebabkan meningkatnya pengaguran, inflasi, dan eksploitasi tenaga kerja oleh Perusahaan Belanda seperti Deli Maatschappij. Gerakan nasionalisme, termasuk Serekat Dagang Islam dan Partai Komunis Indonesia yang bangkit Kembali menyoroti masalah-masalah ini dalam kampanye mereka, menganggap kolonialisme sebagai penyebab kemiskinan dan ketidakadilan sosial, sehingga mereka mendapatkan dukungan dari petani, pekerja, dan kelas menengah yang merasa frustrasi.

Dari segi sosial, Gerakan ini mendukung inklusi antar etnis, dengan GAPI melibatkan kelompok Tionghoa Indonesia serta etnis lainnya yang berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang lebih luas. Namun, masalah sosial seperti diskriminasi rasial dan keterbatasan Pendidikan bagi penduduk asli semakin mendalam semangat perlawanan, mendorong tokoh-tokoh seperti Hatta untuk menekankan Pendidikan sebagai sarana untuk emansipasi. Seiring dengan pendekatan Jepang, kondisi ini memfasilitasi Kerjasama pragmatis (Pasaribu et al, 2024), Dimana para nasionalis melihat invasi sebagai peluang untuk melakukan reformasi ekonomi, meski dengan resiko ketergantungan yang baru. Dampak ini menunjukkan bahwa gerakan kemerdekaan tidak hanya bersifat politik, tetapi juga terkait erat dengan aspirasi ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi penggerak bagi perubahan struktur menjelang tahun 1942.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini pembentukan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939 merupakan hasil dari interaksi faktor internal dan eksternal yang mendorong lahirnya persatuan politik di kalangan nasionalis Indonesia.

Kekecewaan terhadap kebijakan kolonial Belanda, pengalaman perpecahan antarpartai, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya persatuan menjadi landasan utama terbentuknya GAPI. Di sisi lain, situasi internasional menjelang Perang Dunia II turut membuka peluang bagi elite nasionalis untuk memperjuangkan tuntutan politik melalui gagasan “Indonesia Berparlemen”. Dalam perkembangannya selama periode 1939–1942, GAPI menunjukkan dinamika perjuangan yang lebih sistematis melalui integrasi berbagai kekuatan politik, mobilisasi massa melalui Kongres Rakyat Indonesia, serta pemanfaatan simbol-simbol nasional sebagai alat pemersatu. Meskipun upaya politik tersebut tidak menghasilkan perubahan signifikan dari pihak kolonial, GAPI berhasil menunjukkan kematangan politik bangsa Indonesia dan memperkuat posisi rakyat sebagai subjek perjuangan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa GAPI memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat kesadaran nasional, membangun persatuan politik, serta merumuskan strategi perjuangan yang lebih terorganisasi menjelang kemerdekaan Indonesia. Walaupun dibatasi oleh kebijakan kolonial dan berakhir akibat pendudukan Jepang pada tahun 1942, warisan berupa pengalaman persatuan, jaringan kader, dan strategi politik yang dibangun GAPI menjadi fondasi penting bagi proses menuju Proklamasi 1945. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam peran aktor-aktor individu dalam GAPI serta membandingkan dinamika organisasi ini dengan gerakan politik lain pada periode yang sama guna memperkaya pemahaman tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah, A. (2018). Nationalism, nation awareness and past imagination (A reflections of 65 year history of independent Indonesia). *Historia*, 12(1), 22–39. <https://doi.org/10.17509/HISTORIA.V12I1.12115>
- Anisa, A. N. (2023). Ki Hajar Dewantara dan revolusi pendidikan pada masa pergerakan nasional di Indonesia.
- Claudia, A., Azaria, A. P., Nurshalih, G. A., & Hakim, I. A. (2024). Pengaruh budaya VOC menumbuhkan korupsi di kalangan penguasa Indonesia di era kolonial. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Bahasa dan Budaya*.
- Lubis, S., Sormin, S. A. P., & Pane, S. M. (2022). Peran organisasi Budi Utomo dalam menumbuhkan sikap nasionalisme: Suatu kajian historis terhadap awal kebangkitan nasional Indonesia. *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya*, 2(2), 80–86.
- Muhtarom, H., & Marta, N. (2024). Filosofi pergerakan organisasi Budi Utomo dalam membentuk identitas kebangsaan masyarakat di era globalisasi. *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*.
- Pasaribu, R. M., Barus, S. Y., & Fauzi, M. (2024). Mengobarkan api nasionalisme: Perlawanan rakyat Indramayu terhadap pemerintahan Jepang dan pengaruhnya pada gerakan kemerdekaan Indonesia. *Ilmu Holistik*.

- Pelealu, A. E., Dasfordate, A., & Winoto, D. E. (2021). Tolerance in history national movement. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 17(2). <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/41346/17127>
- Purba, M. B., Arifuddin, A., & Ronauli, A. (2024). Dampak dari sistem tanam paksa dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. *Ar Rumman*.
- Putra, J. S. (2023). Dinamika gerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia abad 20. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*.
- Rasyid, S., & Tamara, A. (2020). Sarekat Islam penggagas nasionalisme di Indonesia.
- Situngkir, C., Silitonga, D. A. B., & Lubis, N. A. P. (2024). Radical and moderate currents of the Indonesian national movement. *Holistic Science*, 4(1), 124–132. <https://doi.org/10.56495/hs.v4i1.557>
- Tahir, I., Hamzah, R. A., Suryani, L., & Nitanto, F. S. (2025). Sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. *Jurnal Yudistira*.
- Tampubolon, M. H. R. (2017). Analisis sosio-legal tentang fungsi kontrol parlemen dalam implementasi regulasi. *Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi*.
- Tarigan, A. H., Syakira, D., Simanjuntak, M., & Sukasa, M. A. (2025). Perlawanan bangsa Indonesia sebagai fondasi terbentuknya kesadaran nasional dan kemerdekaan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 310–326.
- Taufik, M. (2021). Dinamika dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di Indonesia.
- Yuniyati, W. A., Agung, L., & Warto, W. (2018). Boedi Oetomo: Organisasi multietnis dan perintis semangat nasionalisme. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama*.
- Yusuf, I. P., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah pergerakan Indonesia*. Klaten: Lakeisha.